

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Desa adalah Dana yang Dialokasikan dalam APBN yang di peruntukan bagai Desa yang di transfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan Meningkatkan pendapatan Desa yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan Masyarakat berupah pemenuhan kebutuhan dasar, penguatkan kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui musrenbang Desa.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan di salurkannya Dana Desa adalah sebagian bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. dengan adanya Dana Desa, Desa dapat menciptakan Pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju Masyarakat yang adil, Makmur dan Sejahtera.

Desa Rahmat telah menerima Dana Desa sejak tahun 2016 hingga sekarang, total anggaran Dana Desa mencapai 1 miliar untuk setiap Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 : Jumlah Dana Desa (DD) 2016-2020

No	Tahun	Jumlah anggaran
1	2016	1,085,743,000
2	2017	1,180,000,000

3	2018	1,230,012,000
4	2019	1,372.041,000
5	2020	1,378.305,000

Sumber : sekretaris Desa Rahmat

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Perhitungan Dana Desa berpatokan pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin Dana Desa secara lebih merata (kompas 2015).

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Rahmat dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembnagunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Mulai awal tahun 2015, Desa mendapatkan Sumber Anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan Anggaran berupa Dana Desa yang akan di terima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka Kemiskinan dan kesulitan geografis.

Pertumbuhan Ekonomi memang penting, strategi penanggulangan Kemiskinan yang lebih lengkap harus mengambil faktor yang relevan, dalam konteks desentralisasi, Analisis subnasional dapat menjadi pendekatan instruktif untuk memeriksa pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengentasan Kemiskinan (Balisacan,2003). Pembangunan itu bersifat dinamis dan Multidimensional, Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama yaitu Kesejahteraan Masyarakat di suatu Negara atau Daerah.

Menurut Marhaeni (2016) salah satu cara meningkatkan pendapatan Masyarakat agar dapat merasakan kehidupan yang layak adalah melalui Pembangunan ekonomi yang merata di setiap wilayah. Pembangunan dapat berupah sarana dan prasarana infrastruktur

yang mendukung semua sektor yang ada dan pengentasan masalah kemiskinan guna meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Persoalan utama yang dapat menghambat pembangunan salah satunya yaitu kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang bersifat negatif dan berdampak buruk bagi kemajuan suatu daerah, jadi masalah kemiskinan ini harus dapat diberantas sampai ke akar-akarnya (wirawan, 2015). Masih adanya penduduk miskin di beberapa wilayah artinya strategi pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat belum benar-benar efektif dilaksanakan. Kemiskinan adalah gambaran dari ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kehidupan yang layak.

Sekine (2008) memiliki pendapat bahwa kemiskinan tidak hanya masalah pendapatan tetapi juga mengenai kekurangan kapasitas pelayanan sosial dan kebebasan individu dalam mewujudkan dirinya menjadi lebih baik. Chamber (Syaf, 2013) mengatakan ada dua macam situasi kemiskinan yaitu penyebab kemiskinan karena berada pada daerah yang terpencil dan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya dan kemiskinan yang terjadi karena adanya ketimpangan yang mencolok antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di suatu daerah yang sama.

Menurut Yusuf dan Sumner (2015) faktor utama yang meningkatkan kemiskinan seperti halnya di Indonesia adalah adanya kenaikan harga bahan bakar dan kenaikan harga bahan makanan pokok seperti beras. Dua hal itulah yang dianggap meningkatkan kemiskinan karena dengan meningkatnya harga bahan bakar dan bahan makanan pokok masyarakat menjadi tidak mampu untuk membelinya.

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Mudrajad (2006) IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah

mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktifitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011: 8). Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama, ditujukan untuk orang-orang yang miskin seperti: bantuan beras untuk orang miskin, bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan jaminan kesehatan dan PNPM mandiri. Kedua, ditujukan kepada seluruh masyarakat misalnya, pengurangan biaya sekolah (BOS) dan pendanaan pelayanan kesehatan (Sutikno dkk, 2010).

untuk menghitung dan mengetahui garis kemiskinan menggunakan metode secara terpisah untuk daerah, perkotaan, dan pedesaan yang terdiri dari dua komponen, diantaranya garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

1. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, ubi-ubian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.)
2. Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan di wakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan, baik yang dikarenakan ketidak beruntungan situasi (*deprivation trap*) atau bisa juga miskin akibat dimiskinkan atau yang kita kenal sebagai kemiskinan struktural, pada hakekatnya sudah dilakukan sejak lama. Deretan program pengetasan kemiskinan telah banyak diluncurkan oleh pemerintah, mulai dari inpres desa tertinggal (IDT), program tabungan kesejahteraan rakyat kredit usaha untuk kesejahteraan rakyat (takesra-kukesra), program penanggulangan dampak krisis ekonomi (PDM-DKE), dan program jaring program sosial bidang kesehatan (JPS-BK), kemudian juga di teruskan dengan bergulirnya program subsidi langsung tunai/bantuan langsung tunai (SLT/BLT), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Terakhir, program penangulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah berubah program bantuan siswa miskin (BSM), program keluarga harapan (PKH). Semua program tersebut memiliki satu tujuan utama yaitu berupaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dalam suatu rangkaian program pemberdayaan. Bila dicermati, terdapat beberapa kelemahan mendasar dari berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini. Tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin. Hal ini terjadi karena program lebih bersifat dan berorientasi pada balas kasihan, sehingga dana bantuan lebih dimaknai dana bantuan Cuma-Cuma dari pemerintah.

1. Asumsi yang di bangun lebih menekankan bahwa warga miskin membutuhkan modal. Konsep ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang di miliki warga miskin.
2. Program pemberdayaan lebih dimaknai secara parsial, misalnya titik berat kegiatan program halnya mengintervensi pada satu aspek saja, seperti aspek ekonomi atau aspek fisik, belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu (taufiq, et,al,2010).

Berdasarkan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan pendapat-pendapat mengeniannya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan belum efektif, sehingga sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan.

Tingkat kemiskinan di desa Rahmat, data yang di ambil dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel 1.3. jumlah tingkat kemiskinan di Desa Rahmat

No	Tahun	Jumlah
1	2016	85%
2	2017	75%
3	2018	65%
4	2019	60%
5	2020	50%

Sumber : Pemerintah Desa Rahmat

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan yang terjadi di desa Rahmat pada tahun 2016 itu sebanyak 85%, dari 100 kk yang masi menggunakan perumahan dengan model bangunan rumah papan, atap,dan lantainya masi tanah. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat kemiskinannya menurun sebanyak 75%, setiap tahun tingkat kemiskinannya menurun di karenakan adanya dana desa, di tambah lagi jumlah dana desa di setiap tahun jumlahnya berbeda beda. Dan di tahun 2018 tingkat kemiskinannya menurun sebanyak 65%, di tahun 2019 tingkat kemiskinannya menurun sebanyak 60%, di karenakan di tahun 2019 ada tambahan bantuan dari pusat, bantuan RTLH, Dapur Sehat, dan BLT. dan pada tahun 2020, tingkat kependudukan meningkat sebanyak 167 kk, dan tingkat kemiskinannya menurun jadi 50%, 167 kk yang ada di desa Rahmat, jumlah rumah yang ada di desa Rahmat itu sebanyak 154 rumah dan 60 yunit rumah masi menggunakan papan. Dan hampir rata-rata penduduk desa Rahmat memiliki jumlah pendapatan perbulan sebesar 350 sampai 500. Karena di desa Rahmat jumlah petani lebih banyak ketimbang PNS atau Pengusaha.

Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa tinggkat kesejahteraan masyarakat desa Rahmat sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan tinggkat kemiskinannya sudah mengurang sebanyak 50%. Desa Rahmat sangat memprihatinkan karena masih

banyak tingkat pendidikan rendah dengan pola pikir masyarakat masih terbelakang, pendidikan yang rendah membuat masyarakat susah untuk berfikir lebih luas soal pendidikan.

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi, dari sini materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi (hukom,2014).

Menurut Christanto (2015: 118) tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yang merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan. ketiga aspek tersebut adalah aspek kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Masyarakat akan sejahtera jika seluruh aspek diatas terpenuhi, karena seluruh aspek tersebut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Selain itu, pembangunan yang merata pada segala bidang pada masing-masing daerah juga penentu dari sejahtera atau tidaknya masyarakat suatu daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan ?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa pada tingkat kemiskinan
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan pada kesejahteraan masyarakat
3. Untuk mengetahui pengaruh dana desa pada kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.